



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNAWARDI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **500357**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.457.355.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/120 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 559.000.000
2. Tanah Seluas 579 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 187 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/36 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 363.355.000
5. Tanah Seluas 300 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 57.450.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 24.675.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.646.980.000



III. HUTANG

Rp. 113.823.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.533.157.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.